

Transkrip Dialog dalam Acara Mata Najwa “*Perlawanan Mahasiswa*” Part 1

Najwa Shihab : Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa saya Najwa Shihab tuan rumah Mata Najwa. Rangkaian demonstrasi terjadi di berbagai kota, bentuk protes atas legislasi yang semena-mena. Undang-undang yang dikebut di akhir masa jabatan wajar jika memantik banyak sekali kecurigaan, apalagi menjelang pengesahan seperti tuli para penyusunnya seperti ogah mendengar aspirasi. Menutup diri dari pemantauan masyarakat menimbulkan sakwasangka terjadi patgulipat, sudahkah aspirasi rakyat benar-benar didengarkan ataukah para elit menganggap kita layak dipinggirkan? Inilah Mata Najwa ujian revormasi. (dilanjutkan penayangan cuplikan vidieo demo mahasiswa diberbagai kota dan universitas)

Najwa Shihab : Setelah dua dekade kini reformasi dikorupsi disuarakan dengan digolkannya undang-undang penuh kontroversi inilah ujian reformasi. Karena senayan menjadi sasaran mahasiswa menyerukan tuntutan maka Mata Najwa memandang perlu memberikan kesempatan kepada yang terhormat ketua DPR untuk menjelaskan sikap DPR selamat tiga minggu terakhir ini. Saya dan tim Mata Najwa menghubungi pak Bambang Susatyo melalui semua jalur tapi tidak ada respon karena itu kami kirimkan undangan secara terbuka lewat media sosial, tapi hingga saat ini undangan kamipun tidak di respon. Tapi saya ingin memperkenalkan siapa saja yang sudah hadir dan berani menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa di Mata Najwa, terutama para pelaku aksi gerakan mahasiswa, ada presiden mahasiwa Bem KM UGM Agtiyatul Muktabdir atau Fatur, selamat malam Fatur...//ada juga presiden KM ITB Royyan Abdullah Zaki, selamat malam Royyan...//eh hadir juga direktur eksekutif lokataru Haris Azhar, selamat malam mas Haris...//ada ketua

umum YLBHI teman saya Asfinawati Aswin, selamat malam Aswin...dan pakar hukum tata negara pengajar sekolah tinggi ilmu hukum jentera Bi fitri Susanti, selamat malam Bibi.....//saya sudah perkenalkan sebelah kanan, saya akan perkenalkan ke sebelah kiri perwakilan orang-orang yang kemarin di demo telah hadir kepala staf kepresidenan pak Muldoko, selamat malam pak Muldoko..terima kasih sudah hadir (4.16). Walaupun tidak ada ketuanya, wakilnya berani datang malam ini ada Fahri hamzah wakil ketua Dpr, selamat malam bang Fahri (4.17-4.23) “Menyindir/mengejek”.....//dan ada anggota komisi III Dpr yang juga anggota Baleg ada bang Arsul Susani, selamat malam bang Arsul, Ass...//saya juga mengundang tim perumus RUU KUHP yang juga guru besar hukum UGM, Profesor Edwan Herais, prof. Edi selamat malam, terima kasih sudah hadir..//

Najwa Shihab : Baik, sudah..sudah lengkap semua. Tapi saya ingin memulai dengan mahasiswa dengan Fatur dan Royyan. Emm..gerakan masih yang terjadi beberapa hari terkahir ini diberbagai kota, tolong diingatkan lagi buat mereka yang mungkin lupa atau pura-pura lupa, apa tujuan utamanya. (4.41-5.00) “Menyindir”

Fatur (UGM) : Baik. Ee dari saya ini ya?

Najwa Shihab : Silakan.

Fatur (UGM) : Baik selamat malam, salam sejahtera, shalom, om suastiastu, name budaya, Ass.wr.wb. ee mbk Nana saya ingin mengingatkan kepada para dewan yang terhormat disini kepada pemerintah juga bahwasanya gerakan mahasiswa ini lahir dari keresahan yang organik, lahir dari satu keresahan dan dari kajian-kajian yang akademis sehingga mungkin saya sangat terganggu ketika dikatakan gerakan ini ditunggangilah, gerakan ini ee ingin menjatuhkan dan sebagainya. Saya tegaskan bahwasannya gerakan ini berawal dari keresahan kita KPK yang dilemahkan

dan juga kemunduran dalam pemberantasan korupsi. Paket kemunduran itu bisa kita lihat dari ee pemilihan Capim yang dari prosedurnya mulai bermasalah hingga terpilihnyapun adalah orang yang diduga bermasalah, kemudian revisi KPK yang banyak pasal-pasalnya melemahkan fungsi KPK dan tidak sesuai dengan janji presiden kita yang ingin menguatkan kpk, dari situ keresahan kami lahir. Nah kenapa kami sebut kembali reformasi karena salah satu semangat revormasi adalah memberantas korupsi sehingga ketika ada agenda-agenda tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi itu maka rasanya mahasiswa perlu mengingatkan lagi, kemana sih reformasi yang kita ingin kita tuju. Begitu mbk Nana (5.05-6.25).

Najwa Shihab: Jadi, dasar utamanya, terutama di dorong oleh ee kekwatiran akan melemahnya agenda pemberantasan korupsi. (6.25-6.32)

Fatur (UGM) : Yaps.. dan juga kita lihat lagi RKUHP dan berbagai RUU lainnya tadi RKUHP kita bilang banyak banget pasal-pasal karet yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dekokrasi kita yang mungkin nanti kita bisa bahas. (6.33-6.43)

Najwa Shihab : Oke, saya ingin ke Royyan. Ee..eee...kemarin sempat rusuh, bisa dijelaskan, bisa diceritakan siapa yang rusuh, bagaimana awal mulanya, berapa korban? (6.44-6.51)

Royyan (ITB) : Baik, ee Ass..jadi kalau kita mulai dari kronologi pada tanggal 24, waktu itu dari kawan-lawan sendiri, kita sudah sejak pukul 09.00 berkumpul di sekitaran TVRI, disitu kita berdiskusi mengenai oke, kiranya apa bentuk aksi yang kita sampaikan yang kita lakukan disana dengan pembagian tugas dari masing-masing karena memang betul ee cukup menantang ya mbk Nana karena disana terkumpul banyak sekali aliansi BEM yang sebelumnya pun tidak pernah bertemu. Ada banyak lah yang datang, ada dari Tasik, ada yang dari Bandung, ada yang bahkan dari luar jawa dan disitu kita

betul-betul berdiskusi , dan pada pukul 11.00 kita mulai melaksanakan *long march* dengan dipimpin oleh salah satu mobil komando, dan ya sudah kita lanjut dengan melakukan beberapa orasi dan ee penyampian sikap disana, em dengan tuntutan bahwa kita ingin dengan adanya pihak dari dalam DPR RI yang akhirnya bertemu dengan masa. mengapa demikian? karena, disini kita melihat bahwa masa yang datang demikian beragam, demikian banyak, tidak bisa serta merta kita mengkonsolidasikan suatu bentuk bahwa oke, gerakan ini hanya diwakili oleh satu pihak, tidak tapi bahkan ketika kita konsolidasi distitu bisa sampai 20 sampai 30 pihak berbeda (6.52-8.13)//

Najwa Shihab : Apakah sepanjang 2 hari yang berdemo di depan DPR kan sempat juga diterima ? (8.14-8.18)

Royyan (ITB) : Yaa,

Najwa Shihab : Em, jadi tuntutan itu sempat disampaikan adakah yang kemudian ditindak lanjuti atau bagaimana mekanisme sehingga apakah memang sudah didengar langsung aspirasi teman-teman ini ? (8.20-8.28)

Royyan (ITB) : Baik, jadi sebetulnya kita bisa bilang awalnya dari tanggal 19 september, dimana disana dari kawan-kawan mungkin total sekitaran 3000 mahasiswa dari sekitar 20an kampus dan disitu kita mengusulkan beberapa hal terutama terkait dengan revisi UU KPK yang bermasalah dan juga terkait RUU KUHP. Disitu sayangnya kita tidak langsung bertemu dengan anggota legislatif, namun kita dipertemukan dengan sekretaris jenderal DPR RI yang tentu saja fungsinya berbeda. Akhirnya disitu kita mencoba menemukan sebuah titik temu menemukan sebuah kesepakatan yang kita dapati membuat sebuah surat kesepakatan untuk dari bapak ee yang terhormat Insinyur Indra Iskandar menjamin akan

disampaikannya tuntutan kami dan dijamin diadakannya sebuah pertemuan sebelum tanggal 24 September. (8.29-9.16)

Najwa Shihab : Oke, jadi sudah ada ee apa namanya pertemuan yang menyepakati itu? (9.17-9.20)

Royyan (ITB) : Itu tanggal 19 . (9.21-9.22)

Najwa Shihab : Itu terjadi tidak pertemuan itu ? (9.23-9.24)

Royyan (ITB) : Dan itu kami tunggupun di depan ee gedung DPR RI pada tanggal 23, dan itu masih tidak terjadi namun pada tanggal 23 kami diterima masuk dan sayangnya ketika kami menanyakan tuntutan yang sudah kami ajukan yang sudah disepakati oleh ee bapak sekretaris jenderal sayang di jawab dengan pernyataan “Mohon maaf saya belum pernah mendengar sama sekali perjanjian tersebut. Jadi kami merasa amat sangat kecewa”. (9.25-9.45)

Najwa Shihab : Siapa yang menjawab seperti itu? (9.46-9.47)

Royyan : Dari bapak komisi III (9.48)

Najwa Shihab : Komisi III, yang menerima teman-teman ? ee karena kenapa saya tanyakan karenakan kemudian ee ketua DPR mengatakan ingin bertemu mahasiswa dengan segala kerendahan hatinya, tetapi karena rusuh jadi tidak bisa keluar, sempat ada pertemuan itu? Dengan ketua DPR ? (9.49-10.06)

Fatur : Tidak, dan kalau dibilang karena rusuh sebenarnya kan dari awal kita datang kita damai , kenapa nggak datang dari siang, kenapa tidak datang pas kita panggil ya? Oiya saya ingat banget kita ultimatum waktu itu ada, saya lupa, ada kapolres apa kapolda ee yang menyampaikan ee semacam pidato begitu, kemudian dari korlap menyampaikan kit mau ultimatum 30 menit tolong dong ee pak Bambang Susanto diajak keluar untuk kemudian ee kalau memang jadi ditunda yaudah umumkan, kalau memang tidak jadi

ditunda ya sampaikan begitu. Setidaknya kita ada dialog dulu tapi kemudian kita tunggu sampai sore, siang ditengah teriknya matahari kita tunggu, sore ya akhirnya tadi tidak ada pertemuan itu (10.07-10.48)
“Marah/menyalahkan”

Najwa Shihab : Tidak ada pertemuan dan kemudian ee teman-teman mahasiswa memang merangsek masuk ke pagar DPR. (10.48-10.54)

Royyan : O tidak, jadi sebetulnya begini, dari kami, kami sudah menyampaikan diatas mobil komando itu dari korlapnya menyampaikan. Oke dari semua masa tenang, kita sampaikan aspirasi kita dan salah satu cara terakhir kita karena ee disini kita bicara soal lapangan, kita bicara soal mengumpulkan banyak kultur, banyak pihak, banyak orang dan banyak kepala, yang berbeda-beda untuk punya satu fikiran dan satu metode yang sama dan itu sangat kompleks. Bagaimana menyatukan lapangan itu. Dan ya sudah ee cara yang akhirnya kami lakukan adalah diatas mobil komando kami sampaikan oke jam setengah 4 ini kita lakukan konverensi pers , harapannya konverensi pers ini bisa menyampaikan apa yang kita harapkan . Baik dari segi tuntutan maupun dari segi pihak yang kita minta untuk keluar bertemu seperti itu. (10.55-11.41)

Najwa Shihab : Dan itu tidak pernah terjadi akhirnya..(11.42-11.43)

Royyan : Dan konverensi pers sudah dilakukan tetapi sayangnya tidak ada kelanjutan. (11.44-11.45)

Fatur : Termasuk malam ini tidak terjadi juga mbk Nana. (11.46-11.48)
“mengeluh”

Najwa Shihab : Termasuk malam ini juga tidak ada respon. Tapi yang hadir ada wakil ketua DPR yang juga mantan aktivis mahasiswa pada tahun 1998 ada bang Fahri Hamzah. Bang Fahri Hamzah ada adik-adik Anda bang. Silakan ditanggapi (11.49-12.02)

Fahri Hamzah : Soal Apa ? (12.03-12.04)

Najwa Shihab : Apakah memang, DPR tidak ada keinginan untuk membuka ruang dialog itu? (12.05-12.10)

Fahri Hamzah : Ya, saya nggak tahu ya. Tapi kan DPR itu memang tempat dialog ya hari-hari. Ee.. partainya banyak agamanya banyak, sukunya banyak dan orang tu beda pendapat semua. Ada yang ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Mantan aktivis ada, lawyer ada, dan memang hari-hari ya berdebat lah ya, karena itu mustahil anggota DPR itu menghindari dialog dan perdebatan itu karena sudah makanan hari-harinya. Membuat undang-undang juga itu perlu dialog karena itukan tahapan-tahapan membuat undang-undang itu ada rapat dengar pendapat, ada kunjungan ke kampus dan sebagainya, sosialisasi dan tidak ada beban karena setiap masukan itu merupakan konten yang harus diterima menjadi bagian dari rumusan UU. Nggak ada kepentingan kita, orang undang-undang itu dibuat untuk publik kok, untuk masyarakat begitu, apa yang menjadi aspirasi ya tinggal dicantumkan saja, cuman ya nggak bisa ambil plek begitu, ada perdebatannya begitu, dan perdebatan itu dengan ahli. Anggota DPR inikan bukan ahli secara teknis membuat UU. (12.11-13.29)
 “Marah/Menyalahkan”

Najwa Shihab : Oke, bang Fahri apa tanggapan Anda atas berbagai tuntutan mahasiswa dan berbagai aspirasi yang mereka sampaikan. Apakah DPR mendengar aspirasi-aspirasi itu? (13.30-13.38)

Fahri Hamzah : Ya pastilah ini, DPR kan lembaga pendengar aspirasi kan, memang saya malah mengusulkan presiden tu ya, pak muldoko ya tolong di dengar lagi ya, saya mengusulkan presiden itu itu apa, karena kita itu tidak punya kuasa keuangan seluas pemerintah. Kita punya ide itu belum tentu jadi karena uangnya itu dipegang pemerintah. Beda dengan parlemen di negara-negara maju yang punya apa namanya SIBIO ya, kongresonal budget office, yang dia bisa kontrol diri. Saya mengusulkan

bikin tempat demo yang besar di deapn DRP lalu diatur bagaimana mekanisme supaya nanti kalau ada demo itu indikator kalau banyak demo berarti banyak masalah. (13.39-14.22) “Mengharapkan”

Najwa Shihab : Tetapi yang sudah janji saja tidak ditepati janjinya kok. (14.23-14.25) “Menyalahkan”

Fahri Hamzah : Siapa ?

Najwa shihab : Itu tadi sudah diterima oleh Sekjen, sudah dibuatkan janji tapi tidak ditepati. (14.26-14.29)

Fahri Hamzah : Saya dengar dari Sekjen katanya habis itu diatur pertemuan dengan Baleg, dan saya dengar juga sudah ketemu dengan Baleg, dan Baleg itu memang sentrum dari pada legislasi DPR, namanya jga badan legislasi. (14.30-14.44)

Najwa Shihab : Jadi seharusnya sudah selesai urusannya bang Fahri ? (14.44-14.45)

Fahri Hamzah : Ya artinya kalau sudah ketemu kan artinya ada proses dialog di Baleg itu, dan setahu saya tanggal 23 ee ketemu Baleg itu tanggal 23 jam 2 kami sudah keluar dari kantornya pak Mudoko dengan kesepakatan yang diumumkan ke seluruh Indonesia bersama presiden, 24 kan masih besar kan dan saya sendiri terkurung nggak bisa keluar kemana-mana dan saya lihat itu ee malam-malam itu sudah bakar-bakar itu, sorelah mulai bakar-bakar itu. Jadi saya mengumumkan di twitter saya menunggu di dalam, hari ini juga nenunggu, menunggu teman-teman tapi yang ada ee STM-STM katanya bawa pisau, celurit, kemudian lempar batu, ya enggak sempat ketemu kita. Saya baru dari kantor ini terus kesini itu. Siap dialog karena ada mahasiswa disini ya dialog sini saja, kan disiarkan langsung ini kan, gratis inikan. (ekspresi menyepelekan) (14.46-15.47) “Mengejek”

Najwa Shihab : Ehemmm, gratis tidak bayar. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana dialog itu, saya juga ingin mendengarkan dari pak Mudoko. (15.48-15.52) “Mengejek”

Transkrip Dialog dalam Acara Mata Najwa “Perlawanan Mahasiswa” Part 2

Penayangan wawancara klarifikasi tokoh terkait.

Najwa Shihab: Apakah ya sudah tidak relevan lagi berbagai aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa pak Muldoko ? memang sudah tidak relevan lagi apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini karena sudah selesai semua urusan? (1.18-1.28)

Muldoko : Ya, kalau dilihat dari ee pertemuan konsultasi antara presiden dengan ketua DPR dan ketua Praksi itu sebenarnya ada kesepakatan-kesepakatan beberapa UU yang sebagian besar dituntut oleh teman-teman mahasiswa itu sebenarnya sudah clear begitu ya, tuntutan itu sudah dipenuhi untuk ditinjau kembali begitu, jadi ee sebenarnya yang dikatakan tidak relevan ya itu. Berikutnya saya secara pribadi melihat teman-teman mahasiswa dalam berdemo sekarang itu bagus cukup kreatif. Ee yang pertama saya dengar logistiknya dikelola dengan baik, transparan, mandiri begitu ya, berikutnya yang saya salut teman-teman nggak terpengaruh oleh tema yang lain ada tema yang coba dikembangkan turunkan Jokowi tapi teman-teman mahasiswa nggak terpengaruh. Itu yang saya hormati dan respek itu ya, sasaran juga tepat ke DPR ya karena memang ini seasi untuk titik beratnya ke KPK itu memang ya seasi. (1.29-3.02) “Menyalahkan”

Najwa Shihab: Kalau sasarannya ke Presiden memang tidak tepat ? (3.03-3.04)

Muldoko: Ee sebenarnya nggak papa, biasa saja wong kita itu persoalan demo bukan persoalan yang apa haram bagi pemerintah kan endak. Bahkan dalam mengelola pemerintahan yang efektif ya di kantor saya itu saya buka namanya Ksp mendengar, kami biasa menghadapi teman-teman

mahasiswa itu sehari-hari, berbagai elemen kelompok masyarakat datang ke Ksp berdialog marah saya dengerin saya catat. Dan saya biarkan mereka berbicara, saya nggak pernah intrupsi, saya nggak pernah marah endak. Yang saya catat itu pada kesempatan pertama ketemu presiden saya lapor “pak presiden saya telah menerima kelompok ini, apa yang dikatakan bahwa pemerintah memberikan atensi, mohon ini menjadi perhatian presiden ” presiden biasanya langsung oke, panggil menteri yang bersangkutan kita bicara. Aa itu cara-cara kami mengelola pemerintahan yang efektif. (3.05-4.08) “Mengejek”

Najwa Shihab: Oke kemudian sekarang ekskalasinya meningkat, apakah itu artinya tidak tersampaikan atau Presidennya tidak mendengar atau ini sesuatu yang lain lagi bagaimana anda menilai eskalasi demonstrasi mahasiswa ini? (4.09-4.19)

Muldoko: Ya..mungkin teman-teman mahasiswa nostalgia juga kali ya, karena sekian lama tidak pernah ketemu kan begitu,ee jadi..(4.20-4.28) “Mengejek”

Najwa Shihab: Ee hanya nostalgia ini pak Mul dinilainnya? Saya ingin tanya ini nostalgia sajakah teman-teman mahasiswa? (4.29-4.34) (marah,kesal)

Muldoko dkk: Ya penting juga lah..

Najwa Shihab: Ada kesankah merendahkan perjuangan mahasiswa ini? Kok hanya dibilang nostalgia? (4.35-4.42) “Marah”

Muldoko dkk: Bukan..bukan merendahkan mereka. Kalau sekian lama mereka nggak terjun kelapangan, kan begitu. (4.43-4.44)

Fahri Hamzah: Jadi dulu itu ada namanya buku pesta dan cinta begitu, nah itu biasa saja itu.. kaum pergerkan itu harus sering ketemu memperjuangkan apa yang...(4.44-4.48) “Mengejek”

Najwa Shihab: Ee biasa! jadi suara-suara itu biasa saja? saya kasih kesempatan silahkan .(4.49-4.50) “Marah”

Fatur: Iya mbk Nana, ee agak salah atau agak kurang update ya pak Muldoko dan Bang Fahri karena kalau lihat sebenarnya aksi-aksi mahasiswa itu terjadi tiap tahun, bener nggak? Jadi tidak ada istilahnya mahasiswa lagi tidur siang..(4.41-5.11) “Mengejek/marah”

Muldoko: Iya tapi sekalanya ini bos, ini kan sekala biasanya sekala kecil ini sekala besar, baguslah.. (5.12-5.20) “Marah”

Fatur: Benar itu artinya kalau saya sih katakan seperti ini, peningkatan kuantitas dan kualitas tuntutan dari aksi mahasiswa ini sejalan dengan menurunnya pengelolaan pemerintah. Dan tadi pak Muldoko mengatakan demo bukan haram, oh oke demo bukan haram kok teman-teman kita sekarang lagi di tahanin sih di kepolisian, bahkan ada yang lagi makan di suatu restoran di kena swiping gitu. Katanya nggak haram kok ditahan ? (5.21-5.47) “Menyalahkan/Marah”

Muldoko: Nggak begini..ada persoalan-persoalan yang harus kita pahami bersama ini ya...10 tahun saya tidur di jalanan yaa, waktu saya kapten dengan kolonel, mayer sebenarnya. Sehingga sangat paham melihat psikologi, situasi psikologi baik itu pelaku demo maupun pelaku aparat begitu lo, aa situasi awalnya fres teman-teman pendemo, begitu kena matahari mulai lapar, mulai haus terus dan terusnya tuntutannya belum ada keputusan maka tensinya meningkat kan bgtu, tensi meningkat kelelahan itu mengakibatkan uncontrol. Sehingga pada jam-jam tertentu titik kolminasi itulah akan terjadi, situasi yang nggak bagus, sama saya juga begitu, aparat juga manusia bung, bukan dewa dia. Dia juga punya titik kolminasi. Pada titik kolminasi tertentu itu lah maka terjadi tiksi. Ini yang harus dipahami. (5.46-6.54) “Marah”

Najwa Shihab: Oke saya ingin lempar. Ee silakan mas Aris. (6.55-6.56)

Mas Aris: Iya makasih. Gini kita punya protap kepolisian. Protap tentang penanggulangan perbuatan anarkistis. Ketika semprotan air pertama keluar kemarin, kira-kira jam 5 kurang, saya beberapa menit setelah ketemu mbak Fitri, saya lihat sendiri protap itu ada eskalasi, dia mengambil beberapa pembelajaran, saya pikir protapnya cukup oke lah, dia mengambil protapnya dari pembelajaran internasional tentang penanggulangan demonstrasi dan disitu saya tidak melihat bahwa semprotan air itu dalam rangka untuk merespon satu tindakan yang diluar kontrol, saya juga tidak mengerti mungkin ada informasi dalam polisi bahwa mahasiswa perlu mandi atau apa saya tidak paham. Jadi di semprot. Nah tetapi menurut saya itu justru adalah titik mulai yang kemudian mahasiswa marah naik ke atas mobil polisi dan merusak mobil brimob jadi bukan karena mahasiswa merusak mobil brimob lalu direpresi, saya terima 100% masukan dari pak Muldoko bacaan normatifnya tadi pak secara psikologi, tetapi situasi di lapangan kemarin tidak menunjukkan hal tersebut. yang kedua sweeping, ini orang di sweeping apa ya? Kalau di sweepin di lapangan OTT kan jadinya kalau bahasa Kpk itu, melakukan tindak pidana atau melakukan mencegah dilapangan mereka itu lagi di daerah Benhil ada yang di rumah makan saya dapat vidieonya, apakah makan sudah dilarang pada jam tersebut di republik ini? Saya juga nggak ngerti pak muldoko, nah beberapa hal itu di sweeping dan sampek satu jam setengah yang lalu saya dapat updetan dari teman-teman tim kuasa hukum untuk mahasiswa mereka tidak boleh masuk ke dalam kantor polisi. Oke kita paham kalau diperiksa sebagai saksi memang tidak perlu didampingi, tetapi kalau ada keluarga yang minta atau minta kuasa hukum untuk menjenguk boleh dong? Dan ada beberapa informasi tentang mahasiswa yang dipukuli, kita lihat juga wartawan yang tidak boleh meliput, tidak boleh mengambil gambar, ada yang digebukin, ada vidieo-vidieo yang saya dapat yang kita perlu klarifikasi lebih jauh. (5.67-9.16) “Mengeluh”

Najwa Shihab: Oke, dan anda membaca itu sebagai apa mas Aris ?

Mas Aris : Saya pertama-tama mau bilang alhamdulillah terima kasih buat mahasiswa alarm demokrasi kita hidup...republik ini hutang budi dan kita tidak bisa dilihat sebagai sebuah, ee mohon maaf sesuatu hal yang biasa, makin baik tidak, ini soal rasa, pak Selo Sumarjan itu ahli sociology di UI bilang di masyarakat itu ada jiwa dia ada jiwa yang abstrak, kalau dia dikapitalisir di indikatkan sebagai sebuah demonstrasi satu jam saja ya, apa yang mau dilakukan sekarang RUU KUHP pasal yang mana ya? Saya pikir buang-buang duit negara ini mensubsidi ITB sama UGM lalu anaknya cerdas-cerdas seperti ini lalu mereka meresenpresikan masyarakat datang ke negara hanya dibilang oke, sudah ya saya terima aspirasinya pulanglah silakan kalau enggak kawat saya gede-gede, brimop saya banyak nanti Anda di jaga, di represi, berbahaya buat Anda enggak begitu bangsa ini enggak begitu. Jadi kita ini bukan management office yang peralatannya bisa dibeli di toko alat tulis raknya disebalah mana, garpunya sebelah mana silakan ambil di dapur, tidak, jadi ini merespresikan tujuh hal tidak hanya soal RUU KUHP. Duduk disini mas Edi Os ahli, ada dari komisi III, tetapi mana tujuh hal lain yang ingin di bahas soal Papua kita ini punya masalah sedikit mbk Nana, mumpung ada pak Muldoko ini, susah kita bertemu orang penting seperti pak Muldoko, yakan, jadi begini kita ini ngomong Papua dituduh makar, dituduh isis malah sama menteri pertahanan, bicara soal demonstrasi katanya ditunggangi, yakan, bicara soal RUU KUHP dituduh LGBT. Jadi stigma maju lebih jauh lebih cerdas stigma itu ditunggangi, demonstrasinya ada yang mengotaki dll. Menurut saya kita ini kok nggak maju, inikah ujian reformasi kita kan bisa gagal ujian kita. (9.17-11.33) “Mengucapkan Terima Kasih”

Najwa Shihab: Kita akan bahas itu nanti saya kasih kesempatan karean memang bukan hanya soal RUU KUHP tapi ada tujuh tuntutan mahasiswa dan kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Setelah pariwisata berikut tetaplah di Mata Najwa. (11.34-11.45) “Mengharapkan”

Transkrip Dialog dalam Acara Mata Najwa “*Perlawanan Mahasiswa*” Part 3

Najwa Shihab: Ujian reformasi saya ingin bacakan tuntutan mahasiswa tuntaskan reformasi salah satunya restorasi upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme jangan lemahkan KPK tindak tegas koruptor. Saya ingin ke anggota komisi III yang juga badan legislasi DPR bang Arsulsani. Tidak hanya soal RUU KUHP tetapi berbagai UU yang dinilai berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi, proses legislasi yang dinilai bermasalah dilakukan tersembunyi, terburu-buru, hanya kejar setoran, bagaimana menanggapi berbagai tuduhan itu?

Arsulsani: Yak begini, yang harus saya jwb RKUHP atau UU KPK dulu ini? Kalau kpk ini sekali lagi banyak yang kemudian melihatnya hanya soal proses yang 2 minggu tapi sekali lagi ide revisi UU KPK itu telah berlangsung sejak tahun 2012 ketika masa pemerintahan pak SBY. Pada saat itu sudah ada draf ya, revisi UU KPK ya, saya kira pak Fahri masih di komisi III pada saat itu sebagai wakil ketua pimpinan bahkan, saya belum jadi anggota DPR ya, jadi memang sudah ada. Di bulan november 2015 pimpinan KPK menjawab pertanyaan komisi III dukungan legislasi apa yang diperlukan oleh Kpk untuk mengefektifkan tugas-tugas KPK. Jawabannya ada 3 poin: 1. menyangkut RKUHP, 2. menyangkut RUU tipikor/ perubahan atas UU tipikor ,dan yang ketiga, adalah revisi UU KPK. Dimana juga sudah disebut semua dokumennya ada sama saya ya, saya kira juga pernah saya deliver juga kepada tim Mata Najwa ya, jadi itu semua ada. Kemudian di dalam proses fit and propertes terhadap tim KPK sekarang mejadi pimpinan KPK yang akan terakhir kita tanyakan juga apa pandangan masing-masing ya, sebagai waktu itu calon pimpinan KPK terhadap revisi UU KPK. Pak Agus, Pak Laodip, Pak Saot, Pak Alex Marwata, Bu Basaria semuanya tidak ada yang mengatakan tidak perlu direvisi UU KPK masih cukup baik, nggak ada yang menjawab seperti itu. Januari 2016 mereka terpilih mengadakan rapat dengar

pendapat pertama antara pimpinan KPK dengan komisi III, ada pertanyaan juga dari komisi III, porel pada saat itu dan jawabannya perlu ada revisi UU KPK yang menyangkut antara lain soal pengawasan, ya kemudian juga soal Sp3 secara terbatas. Jadi ini sesuatu yang sudah terkomunikasikan dengan lama. Kemudian mengelinding di 2016-2017 tetapi karena menimbulkan kontroversi yang luar biasa, pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda bukan membatalkan, menunda dalam rangka sosialisasi ya, jadi itu juga berjalan. Nah sekarang RKUHP, “Mengharapkan”

Najwa Shihab: Saya ingin ditanggapi terlebih dahulu kalau ukurannya tadi apakah berarti tuduhan bahwa DPR terburu-buru kejar setoran itu tidak benar mendengar penjelasan tadi Aswi, atau ada yang lain yang belum diketahui publik?

Aswi: Kita gampang saja, kita bandingkan dengan RUU penghapusan kekerasan seksual sejak awal selalu di tolak dengan bilang ini bukan prioritas legislasi bukan prioritas legislasi, tapi UU Kpk cepat sekali bagai jalan tol dan gini mungkin saja walaupun ada dari pimpinan KPK minta di revisi apakah itu untuk melemahkan dirinya, kan tidak masuk akal sedangkan yang dilakukan oleh DPR ini justru melemahkan KPK. Misalnya soal Sp3, sudah pernah dibahas di dalam mahkamah konsitusi dimasukkan kembali sudah pernah di bahas tentang penyidik independen ditolak dimasukkan kembali, inikan memperlemah, esensinya bukan soal diminta atau tidak atau revisi atau tidak, kalau revisi memperkuat rakyat pasti setuju, saya ada di DPR dan banyak sekali mahasiswa yang mengangkat isu pelemahan pemberantasan korupsi yang diwakili oleh pelemahan KPK dan juga masuknya pimpinan bermasalah. (4.48) “Mengeluh”

Arsulsani : Saya tanya, yang melemahkan bagian mana? Coba jelaskan kepada saya

(4.48-4.55) “Menyalahkan”

Aswi: Saya bisa jelaskan pak, kalau saya jelaskan bisa 2jam. Saya ambil sedikit saja.

(4.56-5.01) “Marah”

Arsulsani: Yang paling penting.

Aswi: Yang paling penting tugas dari KPK adalah memeriksa penegak hukum dan penyelenggara negara karena itu ia ditempatkan sebagai lembaga independen dan jangan lupa dia adalah mandat reformasi ada tap Mpr No.10 tahun 1998 tapi kemudian di draf sekarang KPK menjadi pekerjajanya menjadi ASN, Uunya mengatakan ASN adalah orang yang bekerja di lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan punya kepala, pemerintahan yaitu presiden dan dia juga punya berbagai lembaga, artinya bagaimana dia bisa memeriksa orang-orang yang setara dengan dia, ketika dia tidak independe. (5.35) “Menyalahkan”

Najwa Shihab: Bang Fahri

Bang Fahri: Saya jawab..saya jawab...UU No.30 thn 2002 UU KPK ketika lahir ya belum ada penataan yang jelas tentang aparatur sipil negara, yang namanya aparatur negara di Republik ini hanya digolongkan pada 3 klaster. Aparatur militer negara, aparatur kepolisian negara, dan aparatur sipil negara ya. Sifat independensi itu tidak melekat apakah dia aparatur negara atau bukan terlepas dari CV. Sifat independensi melekat pada fungsinya dia bisa menjadi independen apa tidak. Kejaksaan agung jaksa-jaksa itu semua adalah aparatur sipil negara, setelah lahirnya ASN ya, apa kita mau mengatakan bahwa semua jaksa yang ada di Indonesia ini tidak bisa independen, karena dia statusnya adalah ASN (6.32)

Aswi: Kalau kita mau jujur ada rentutan blalalala, bagaimana bisa independen?

Najwa Shihab: Tapi yang justru lebih ekstrim adalah sifat wakil ketua DPR Fahri Hamzah yang bilang sebaiknya malah dibubarkan saja KPK ? Anda lebih ekstrim KPK tidak perlu ada . (6.53) “Mengejek”

Fahri Hamzah: Masih saya, sikapnya masih sama. Karena saya punya teori tentang kehadiran lembaga-lembaga sampiran. Di dalam negara dalam tradisi demokrasi karna itukan saya urut logikanya dari awal kenapa kita reformasi, kenapa kita melahirkan demokrasi kenapa kemudian demokrasi itu menciptakan transisi yang tugas transisionalnya adalah menyiapkan kelembagaan negara setelah kita memperbaiki regulasinya, mempersiapkan kelembagaan negara untuk masuk ke alam demokrasi baru itu karena tradisi birokrasi kita yang korup itu perlu dibimbing, di tuntun, khususnya penegak hukum dalam alam baru demokrasi yang anti korupsi. (7.40) “Mengharapkan”

Najwa shihab : Dan KPK tidak pada porsinya melakukan itu? (7.42)

Fahri Hamzah : Menurut saya ya mohon maaf gagal sudah kok. Saya kalau disuruh memberantas korupsi paling lama 5tahun saya selesaikan, pertanyaannya adalah kita mau ini selesai atau mau kita suka rame-rame dan nggak harus selesai karena “Mengejek”

Najwa Shihab: Dalam kapasitas apa bang Fahri 5tahun bisa selesai memberantas korupsi ? (7.59) “Mengejek”

Fahri Hamzah: Ya apapunlah kalau memang saya ditugaskan memberantas korupsi saya selsesaikan , soal gampang kok, masa korea selatan bisa, singapore bisa, malaysia bisa, taiwan bisa, negara-negara itu bisa malah kita sekarang kalah sama timor leste masa bangsa Indonesia nggak bisa, itu ngawor itu, saya bisa selesaikan leih cepat. (8.17) “Mengharapkan”

Haris: Saya mau masuk dan pertanyaannya adalah betul kalau 5 tahun bisa diselesaikan memang bisa, kalau Kpknya diperkuat, tapi kalau Kpknya diperlemah 50 tahun lagi juga nggak bakal selesai. “Marah”

Fahri Hamzah : Justru itu, justru kesalahannya itu ya kesalahan cara berfikirnya adalah karena tidak berfikir sistem tapi berpikir kelembagaan. Saya itu pengertian saya tentang demokrasi adalah ekosistem anti korupsi, tidak mungkin ada korupsi di dalam demokrasi karena rakyatnya bebas. Sistimnya terbuka regulasinya transparan, birokrasinya transparan, orang bekerja dalam aquarium yang disaksikan oleh masyarakat lalu ada leadership yang dipercaya oleh rakyat karena diupdate reputasinya. Menurut saya itu adalah fashtrack menuju negara yang bebas korupsi. Itu dulu yang saya maksud waktu kita demo dulu itu menubangkan orde baru karena kita tahu ini jalan yang paling cepat memberantas korupsi. Kemudian kalau sekarang kita demo, korupsinya tidak selesai-selesai ya kemudian kita harus bertanya, ada apa, kenapa ini nggak selesai , saya kalau di kasih tugas saya selesaikan secepat-cepatnya . kan begitu..(9.36)

Aswi: loh Bang Fahri kan penyelenggara negara? Jadi sebenarnya yang harus ditanyakan ya bang fahri sendiri, kenapa selama beraapa lama sudah menjadi anggota Dpr? Ternyata belum ada kemajuan yang signifikan dalam pemberantas korupsi. 9.47

Bang Fahri: Oke sekarang apa beda antara, Kpk lahir tahun 2002 UU 30 tahun 2002. Apa tugas Kpk ? kan memberantas korupsi.9.59

Cewek: dan dia lakukan itu?

Bang Fahri : Ya dia lakukan itu. Tapi kenapa korupsinya nggak selesai?

Cewek : karena begitu banyaknya korupsi yang lain.

Bang Fahri: Enggak itu salah identifikasinya. Saya bisa mengidentifikasi dengan kekuasaan yang dimiliki bisa diselesaikan lebih cepat apalagi dengan super power yang dia punya. Masalahnya saya sebagai wakil rakyat saya dipilih oleh rakyat bertanya ee Fahri kau kasih duit itu kepada Kpk begitu banyak, kenapa ini masalah malah nggak selesai-selesai? Setiap

hari makin banyak makin banyak orang dtangkap, itu kan kayak kominsaris , kau bikin perusahaan tapi malah rugi ya bubarkan saja.
10.37

Aswi: dan yang ditangkap kan kebanyakan dari anggota Dpr juga ?

Bang Fahri: itu dia penyimpangan-penyimpangan yang dia buat. Ini logika-logika yang dia bangun...

Transkrip Dialog dalam Acara Mata Najwa “Perlawanan Mahasiswa” Part 4

Pembuka: yang jelas bukan hanya revisi UU Kpk, tapi juga di KUHP kemudian juga RUU pemasyarakatan semuanya di nilai akan membawa berkah, berkah besar bagi koruptor . apakah itu benar? Kita akan membahas itu satu persatu kalau waktunya sempat tetapi yang jelas saya ke pak Muldoko dulu. Pak Mul kenapa berbeda sikap pak Jokowi ketika RUU KUHP ditunda untuk mendengarkan aspirasi masyarakat tetapi revisi UU Kpk sikap yang itu tidak diambil oleh presiden ? (menyalahkan)

Moeldoko: Ya kan Presiden pada saat itu mengatakan saya tidak setuju dengan pasal ini , akhirnya diperbaiki oleh beliau ini..ini..ini. saya tidak setuju dengan ini diperbaiki dengan ini..ini begitu. Berbeda dengan KUHP, KUHP dalam ini karena datangnya dari pemerintah kalau tidak salah maka ada sesuatu yang banyak kurang ada 10 poin kalau nggak salah waktu itu, perlu adanya perbaikan-perbaikan yang direvisi ulang begitu, sehingga... (1.40)

Najwa Shihab: Revisi UU Kpk juga banyak sekali masukan-masukan dari publik, tetapi kenapa sikapnya berbeda pak Mul? (1.47) (mengeluh)

Moeldoko : Ya...berbeda itu ditunjukkan oleh presiden ada sebuah perbaikan langsung dari presiden waktu itu kan, kan begitu. Ada beberapa poin,

ada 5 poin dari presiden kalau tidak salah waktu itu langsung diperbaiki. Ada feedback pada Dpr kan begitu. (2.7)

Najwa Shihab: Sekarang tuntutananya Perpu, presiden diminta mengeluarkan Perpu untuk bisa membenahi berbagai kesalahpahaman UU, memperbaiki beberapa hal yang dianggap melemahkan UU Kpk, mungkinkah itu dilakukan? (2.26)

Moeldoko : Yaa Perpu kan bukan satu-satunya jalan, kan ada jalan lain yang bisa ditempuh , kan ada...mas Edy bisa menjelaskan, dan teman-teman mahasiswa juga sudah mengajukan begitu. Jadi silahkan jalan itu dilakukan, tidak ada masalah. (2.42) (Marah)

Najwa Shihab : Saya ingin minta tanggapan (2.45)

Bivitri Susanti : kalau pertanyaan yang sama diajukan ke saya yang tadi ke pak Moeldoko apa yang menyebabkan berbeda, kalau pandangan saya sih jelas sekali karena RUU Kpk ini atau revisi UU Kpk memang dampaknya langsung kepada politisi dan termasuk pemerintah ya.(2.58) (Menyalahkan)

Bang Fahri : itu yang menurut saya tidak fer ya, anda terus menerus mengatakan ini politisinya yang maling terus Kpknya mau di kedei itu nggak bener dong, Anda terus menuduh terus (3.01) (Marah)

Najwa Shihab : Bagaimana kalau kita dengarkan dulu bang Fahri ..

Bang Fahri : Ini narasi Kpk yang berbahaya, semua orang maling kecuali Kpk, nggak bener dong.. (3.18)

Bivitri Susanti : menurut statistik yaa, keputusan pengadilan. Siapa yang paling banyak, profesi apa yang paling banyak terkena tindak pidana korupsi . dan salah satunya adalah yang paling tinggi sebenarnya dari pilitisi, nahn kalau UU KUHP.. saya kira ini pertanyaannya saya kira kenapa sikapnya berbeda. UU KUHP siapa yang terkena dampak..kita semua sebenarnya. Tidak langsung kepada politisi,

jad kepentingan UU Kpk itu lebih langsung ketimbang UU KUHP yang sbenarnya kenanya ke kita. Justru elit politik tidak akan langsung bersentuhan menghina presiden, dll. itu saya kira yang membuat perlakuan presiden berbeda. (3.55) (Menyalahkan)

Haris Azhar : Begini begini kalau tadi .. saya mau nyambut ya tadi pendapatnya bung Fahri soal memberantas korupsi. Ini sebenarnya pak Moeldoko yang bisa menjelaskan, setiap tahun kan ada impres, terakhir tahun 2018 perpres ya pak ya. Parpres 54 tentang strategi pencegahan dan salah satu poin dalam strategi tersebut adalah meminta setiap kantor kementerian LK dan lembaga dalam pemerintahan itu membuat strategi. Kalau kita ke daerah-daerah spanduknya sih tegas dan jelas “daerah bebas korupsi, zona berintegritas kek begitu-begitu tanda tangan partai integritas segala macem”. Nah saya ingin tahu hasil laporan itu kemana ? berapa duit yang diselamatkan dari program prepes tersebut pak? Tugaskan Ksp itu kan mengevaluasi apakah bawahan-bawahan presiden mengerjakan sesuai perintah presiden? Nah harus dilihat, kenapa kok kita bicaranya seolah-olah bung Fahri yang salah ini Kpk begitu. Jadi mengevaluasi sukses atau tidaknya pemberantasan korupsi itu bukan di Kpk tetapi di Presiden. Nah dengan logika itu berapa banyak yang sukses menjalankan program itu berapa duit negara yang diselamatkan. Saya kasih contoh gampang, ada korupsi dana pendidikan yakan, harusnya di sekolah ketangkep sama Kpk atau kejaksaan atau polisi diproses duitnya dikembalikan ke negara yakan, masyarakatnya tetap dapat sekolah nggak ? enggak. Jaid maksud saya gini, ada masalah yang lebih luas untuk melihat bahwa sukses atau tidak pencegahan korupsi atau penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Kemudian pertanyaan saya penting untuk pak Moeldoko, diamana kita bisa melihat alat ukurnya, sukses atau tidaknya pak? (5.40) (Mengharapkn)

Najwa Shihab: saya ke Prof. Edi dulu...silahkan prof edi.

Prof Edi : Oke begini, saya melihat segala sesuatu dari segi filosofis yang harus orang pahami bahwa yang namanya komisi pemberantasan korupsi itu dia bekerja dalam konteks yuspunendi , yuspunendi itu apa ? dalam konteks hukum formil, dalam konteks hukum acara pidana karena dia menegakkan hukum-hukum pidana material. Materialnya apa? Tindak pidana korupsi. Mas Haris harus pasti tahu, bahwa filosofis hukum acara pidana itu bukan untuk memproses tersangka , filosofis hukum acara pidana itu adalah untuk mengontrol jangan sampai aparat penegak hukum bertindak sewenang-wenang. Itu yang harus di pegang oleh karena itu dalam konteks revisi UU komisi pemberantasan korupsi disatu sisi oke, ada instrumen-instrumen yang dimiliki oleh komisi pemberantasan korupsi mengikat korupsi adalah extraorekraem, tetapi juga dan itu diakui sendiri oleh romyarno sasmita sebagai pembentuk UU Kpk bahwa ketika UU KPk itu dibuat itu melanggar sejumlah instrumen hak asasi manusia. kalau kita konsisten dengan konfensi PBB mengenai anti korupsi yang telah kita sahkan dengan UU No. 7 tahun 2006 itu mengedepankan do proses of low. Mana ada do proses of low tidak ada penghentian penyidikan, nggak ada, harus ada. Jadi kalau belajar hukum acara pidana dengan benar ada yang namanya sangset prinsipal dan ada yang namanya sunrise prinsipal. Ketika seseorang diduga melakukan kejahatan maka secepat mungkin aparat bertindak untuk memproses dia dan dia dapat kepastian hukum. Apa dasar filosofisnya jangan sampai orang lolos, pelaku kejahatan lolos dari hukuman, tetapi harus ada sunset prinsipal. Apa itu sunset prinsipal, penghentian penyidikan . jadi apabila tidak ditemukan bukti ya penyidikan itu harus dihentikan. Itu adalah balancesing. (7.59) (mengharapkan)

Najwa Shihab: oke silahkan aswin?

Ashwin : pertama, apakah UU Kpk adalah hukum acara? Tidak, karena dia juga mengatur soal keorganisasian KPk, institusi Kpk, yang kedua kalau mengikuti do proses of low apakah fungsi sekarang penyidikan,

pemutus penyidikan, penyadapan itu ditaruh di dalam dewan pengawas, itu apakah do proses of low dan itu juga dilakukan oleh Dpr, jadi kalau niatnya mengikuti hukum acara, mengikuti do proses of low ya nggak bener, sudah terbukti tidak. (8.28)

Prof Edi : mbk aswi Kpk itu penegak hukum dalam konteks dalam hukum acara pidana mbk, UU Kpk itu hukum acara pidana, bukan hukum pidana material. Jadi persoalan hal yang bersifat administrasi oke mbk. Dia hukum acara, bagaimana orang bercerita penyidikan, penuntutan bukan hukum acara? Thats nack sans itu hukum acara pidana . (8.51) (marah)

Haris adzhar: Begini mas Edi kalau mau ngotot bahwa itu hukum acara tidak ada masalah oke, sekarang ada dewan pengawas, itu sekarang dia kriminal jasa sistem atau tidak. (menyalahkan)

Prof. Edi : Sebentar ini yang mau saya jelaskan. Dalam tulisan saya di kompas itu jelas, dewan pengawas atau tidak itu i dont care tapi yang saya kritisi dewan pengawas tidak boleh bertindak proistisial. Kesalahan dalam UU komisi pemberantasan korupsi pasal 12 bunyinya begini “komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berwenang antara lain melakukan penyadapan ” jadi itu diberikan kepada lembaga. Coba perhatikan dalam UU terorisme, dan UU narkoba yang diberi kewenangan itu adalah penyidik, bukan lembaganya oleh karena itu penyadapan boleh diberikan kepada penyidik tetapi memberi tahu kepada kapolri sebagai koordinasi fertikal. (Mengharapkan)

Transkrip Dialog dalam Acara Mata Najwa “Perlawanan Mahasiswa” Part 5

Najwa sihab:Ujian reformasi dan salah satu ujian terbesar reformasi saat ini adalah ketika anak kandung reformasi hendak dilemahkan oleh berbagai hal termasuk oleh undang-undang yang sudah direvisi. Apakah itu sen oleh rekan-rekna mahasiswa, silakkan royen atau fatur.

Mahasiswa : Baik, sebelumnya saya ingin bertanya sebelumnya kepada bang fahri kebetulan kita sama-sama menjadi aktifis atau pernah menjadi aktifis. Dulu bang fahri yang pernah menindan dan memperjuangkan reformasi ini, tadi sempat ditanyakan tentang KPK yang belum tuntas dengan tindak korupsinya tapi sebetulnya apakah reformasi juga sudah tuntas atau jangan-jangan dengan kondisi sekarang kita ambil kondisi yang mirip (tidak tuntas) maka KPK di lemahkan dan sekarang reformasi saat ini dilemahkan. (Mengejek)

Bang fahri : Bahwa pasal tetap itu saya juga ikut menyusun karna saya juga anggota MPR transisi yang diminta oleh almahrum Prof. Habibi sebagai kalangan muda yang mewakili kita sepakati, meskipun ada kritikan karna pada pasal tersebut terdapat nama orang. PASAL TAP itukan seperti pasal konsitusi selevel tapi menyebut nama Suharto. Okelah itu berjalan tapi saya berbeda yang disebut anak kandung reformasi itu adalah demokrasi sebagai system karna kita migrasi dari otoritas itu kepada demokrasi. Demokrasi itu sebagai system kerja dan saya mempelajari bagaimana system kerja demokrasi itu, termasuk system memberantas system korupsi. Nah saya menganggap presiden sialisme kita itu harus diperkuat karna presidennya dipilih memiliki tenaga, dia di strum/dicoblos oleh rakyat ratusan jutamaka dengan setrum itu dia punya kekuatan yang *powerfull* yang dapat menghentikan korupsi.

Najwa Sihab : Apakah dengan itu bang fahri dapat mengeluarkan stetmen “salah satu cara menekan presiden jokowi adalah menerbitkan PERPU, saya

tau permainan ini mereka melumpuhkan presiden sampai mengeluarkan PERPU dan di sahkan kembali undang-undang KPK yang lama.

Bang Fahri : Saya sedikit prustrasi bahwa presiden ini (presiden sialisme dan presiden dipilih)ditanya bagaimana membrantas korupsi? Kan saya mewakili rakyat, rakyat melihat kok korupsi belum selesai-selesai. Kan saya mendengar suara rakyat tiap hari ada yang ditangkap. (mengeluh)

Najwa sihab : Kembali dengan yang tadi yang dikatan oleh bang fahri “ini permainan presiden mau dilumpuhkan sehingga PERPU” ini tudingan untuk siapa?

Bang Fahri : Ada perbedaan yang paradigmatic bagian yang mengaggap bahwa KPK itu harus dijaga kesuciannya karna dia instrument berjuang melawan koruptor-koruptor itu suatu mahjab.

Najwa sihab : Bang fahri belum menjawab pertanyaan saya ini permainan siapa?

Bang Fahri : Presiden yang seharusnya yang punya permainan dialah yang seharusnya yang punya dan menentukan dan ditagih kok korupsinya tidak selesai-selesai. Dan dia harus membuat definisi dalam jangka 5 tahun korupsi selesai.

Najwa sihab : KONTEKS anda mengatakan kita mau melumpuhkan apakah itu yang dilakkuakn oleh rekan-rekan mahasiswa.

Bang Fahri : Saya Tanya presiden SBY dua kali, jokowi kalo ditanya bagaimana cara menyelesaikan korupsi ini kok belum usai “kita perkuat KPK” ini yang saya sebel waktu saya Tanya KPK independen KPK kita tidak bisa ganggu. Loh ini presiden sialisme rakyat memilih kok tidak

punya detirminisasi untuk mengatakan 5 tahun saya selesaikan korupsi. (Marah)

Mahasiswa : Katanya presiden sialisme, presiden kita sudah janji untuk memperkuat KPK ya harusnya itu yang kita tagih janji presiden itu, maka jika ada aturan yang melemahkan kita wajar dong kita tagih.

Bang Fahri : Persepsi-persepsi yang dianggap mutlak , saya menaggap refisi ini KPK diperkuat. Karna presiden meletakkan pertanggung jawaban untuk melakkuakn/memilih dewan pengawas dari KPK. Sehingga KPK itu dalam bekerja dia berkordinasi pada lembaga yang lebih besar. Okestra pembrantasan korupsi dipimpin oleh presiden karna menurut saya yang memiliki tenaga membrantas korupsi ini adalah presiden.

Mahasiswa : Saya sedikit menyimpulkan yang dikatakan bayak oleh bang fahri bahwa menurut bang fahri adalah cara terbaik untuk memperkuat DPR, jangan-jangan Dewan Perwakilan Fahri Hamzah bukan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

Transkrip Dialog dalam Acara Mata Najwa “Perlawanan Mahasiswa” Part 6

NAJWA : Anda masih di mata najwa “UJIAN REFORMASI”.

Pertanyan yang sama ke bang Fahri saya lempar ke anda mas haris azhar. Apakah ya, ini permainan, upaya untuk melumpuhkan presiden, mendorong presiden sampai Mengeluarkan perpu mengesahkan kembali UU KPK yang lama ? (0:08-0:20) (Menyalahkan)

HARIS : Saya menolak penggunaan bahasa melumpuhkan presiden. Ini kan sama seperti tuduhan fitnah ke masyarakat, apa... ke mahasiswa, aksi ini untuk menurunkan presiden, enggak ada, mau menurunkan presiden itu presiden periode pertama mau habis tinggal itungan hari, periode keduanya belum di lantik. Ini murni

soal tafsir dan cara pandang masyarakat yang di wakili oleh teman-teman mahasiswa tentang pengesahan revisi UU KPK. (0:21-0:47) (Marah)

NAJWA : Tapi memang Perpu tujuannya? (0:48)

HARIS : Perpu tujuannya sebagai salah satu alternatif gitu. Salah satu alternatif, pilihannya apa? ya membuat undang-undang yang baru, kenapa? Karena syarat perpu nya keadaan genting, bukan darurat. Bahasa di konstitusi itu keadaan gentingnya itu harus terpenuhi, gitu. Nah, tapi kalau undang-undang yang baru rumusnya kan prosesnya butuh proses yang cukup ruwet. Sementara DPR aja sudah mau berakhir,perpu itu sebagai sebuah sikap pertanggungjawaban presiden nanti di minta apalagi UU tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sudah di sahkan. Maka pembahasan yang ada di hari ini bisa di lanjutkan. Oleh karenanya, presiden menunjuk itikadnya lewat Perpu, lalu nanti di bahas oleh periode DPR yang selanjutnya.(0:49-1:32)

NAJWA : OKE,apakah itu di....(1:33)

HARIS : SAYA PIKIR SESIMPEL ITU KOK TEMAN”MAHASISWA.(1:34-1:35)
(Mengejek)

NAJWA : Mahasiswa itu juga harapannya?(1:36-1:37)

ROYYAN: ya jadi sebenarnya salah satu hal yang kita lihat kan akhirnya pemberantasan korupsi ini harus di perkuat.harus dilalui dengan banyak cara dan dengan banyak kelemahan yang ada,kitaMelihat RUU KPK itu masih mengandung banyak permasalahan.kita ingin meng.... melakukan,Apa bahasanya itu meng-shout out gitu,bahwa ini itu ada masalah gitu.kita pengen gimanaCaranya biar dari pihak perwakilan rakyat pun mngetahui bahwa ini masih ada yang salah,iniMasih ada yang salah,ini masih ada yang salah.Dan akhirnya entah kenapa secara tiba”RUU ini di sahkan gitu.akhirnya kita tetap mencari caraBagaimana akhirnya kita bisa menyampaikan ini.pun harusnya itu bukan tanggung jawabMahasiswa untuk menyelesaikan tapi adalah tanggung jawab sosial kita untuk menyatakan Bahwa ini sebetulnya ada yang salah gitu.bahkan

untuk melakukan solusi penyelesaiannya yaitu seharusnya dari pihak yang seharusnya merasa bertanggung jawab.(1:38-2:25)

NAJWA : nanti di tanggapi bibip,silahkan.(2:26)

BIVITRI : yaiya saya mau menyoroti bahwa janganlah kecilkan gerakan mahasiswa yang sudah bagus ini kepada perpu belaka. saya kira tidak ada yang mengancam/menyandera presiden soal perpu. bahwa perpu itu salah satu yang di tuntutan, iya. bersama dengan 6 tuntutan lainnya silahkan. Nah, kita harus ingat bahwa yang di lakukan oleh mahasiswa, betul sekali apa yang di sampai-kan barusan. itu adalah karena komunikasi politik yang selama ini ternyata nggak jalan antara kita-kita yang milih dengan orang” yang di pilih gitu dan akhirnya seperti yang di katakan tadi mahasiswa selama ini sudah mencoba berbagai cara dengan cara dengan gayanya yang seka-Rang ya di sosial media dan lain sebagainya tapi ternyata tidak sampai. Akhirnya harus melakukan demonstrasi itu. tapi jangan di kecilkan kepada kondisi darurat atau sebagainya. tidak ada ke arah situ, karena beda. yang namanya hal ikhwal kepentingan Memaksa dengan kondisi kondisi darurat.(2:27-3:12)

NAJWA : OKE, tadi saya tanyakan perpu. apakah itu sesuatu yang memang dalam pertimbangan presiden, pak MOELDOKO?(3:12-3:18)

MOELDOKO : ya, kegentingan yang memaksa itu kan perlu pendalaman, kan enggak bisa begitu aja di nyata-kan. apalagi revisi undang-undang KPK ini belum masuk dalam lembaran negara. belum ada nomornya. bagaimana belum ada nomornya minta di perpu kan begitu. jadi cobalah jangan, e.. Berpikir itu holistiklah. jangan terfokus pada satu titik gitu. ada alternatif-alternatif lain yang bi-Sa di tempuh.(3:19-3:51)

NAJWA : Adakah indika...ee, kalau misalnya bisakah di pakai contoh ketika presiden SBY mengeluarkan Perpu undang”pilkada?(3:51-3:58)

BIVITRI : sangat bisa.(3:59)

ASFIN : Atau bahkan contoh undang-undang 25/97 tentang ketenagakerjaan yang begitu di sah..eh, Begitu di ketok, tapi tidak pernah di berlakukan karena penolakan masyarakat. Itu juga ada contoh. yang ketiga adalah tentu saja kalau yang

membuat yang mencabut denganMembuat revisi undang undangmeskipun kalau melihat ambisi bung fahri ini kayanya mustahilYa,gitu.(4:00-4:18)

HARIS : Atau gestur gestur tidak menandatangani undang-undang tersebut itu jugajadi presendenUndang undang PKP..PKB tahun 99 yun hap 20 tahun yang lalu ditembak itukan karena undang Un... menolak undang-undang PKB.Akhirnya presiden tidak menandatangani dan tidak diberlakukan.(4:19-4:34)

NAJWA : Jadi ada banyak pilihan sesungguhnya yang bisa di ambil oleh...(4:34-4:36)

HARIS : ada banyak cara...Jadi kata kata soal rumusan teman-teman mahasiswa meminta perpu itu tadi saya bilang,iniSuara dari jiwa masyarakat.di tangkep aja terlebih dahulu.jangan kita berdebat soal perpu bisaMasuk atau tidak,gitu.repot.(4:37-4:50)

NAJWA : oke,bagaimana bung arsul sani?(4:51)

ARSUL : Pak,saya yang orang dari awal itu berpaham ,ya..(4:52-4:57)

HARIS : dia mah pendukung undang undang pkb,pasti nolak.(4:55-4:57)

ARSUL : Berpaham bahwa namanya undang-undang itu bukan kitab suci.teman teman yang selalu mengatakan bahwa undang-undang KPK tidak perlu di revisi,jangan direvisi,itukan orang” yangBerpaham bahwa undang”itu bagaikan kitab suci.(4:57-5:12)

Asfin dkk : bukaaan,bukan disitu.(5:13-5:14)

HARIS : Asumsinya dari mana,bingung saya.(5:14-5:15)

ARSUL : nanti dulu...saya jelaskan.saya jelaskan.Nanti dulu,saya selesaikan dulu dong.nanti boleh kita ganti,boleh.(5:15-5:21)

HARIS : gimana mau di nikmati kalau awalannya sudah enggak enak.(5:22-5:23)

ARSUL : ini kan...

NAJWA : (KETAWA)oke kita kasih tepuk angan semua dulu deh.(5:24-5:28)

FATUR : revisi boleh.tapi memperkuat bukan melemahkan.(5:30-5:33)

ARSUL : sebentar..sebentar.sabar sabar sabar dong ya(5:34-5:36)

FATUR : YA saya sabar.(5:36)

ARSUL : (KETAWA) Jadi yang ingin saya katakan adalah,ini sekarang sudah ada revisi undang-undang.Biar berlaku berjalan.kalau ternyata benar KPKnya lemah,menjadi impoten dan itu penyebabnyaUndang-undang,ya kita revisi lagi.atau kita ee apa.. presiden berinisiatif,atau DPR bisa berinisiatif.(5:37-5:55)
(Mengejek)

NAJWA : semudah itu?(5:56)

ARSUL : LHO kok semudah itu.ya memang bikin undang-undang itu ya tidak juga mudah.Tapi ya bukan sulit sulit amat.itu hal yang bukan biasa saja. BIVITRI : TUNGGU,,TUNGGU. Jangan sampai merugikan publik dong.Tapi jangan sampai berparadigma karena tadinya paradigma menganggap bahwa ini Undang-undang kayak kitab suci nggak boleh di sentuh-sentuh,kalua tidak wudlu,gitu ya.Dan kemudian begitu ternyata disentuh kemudian langsung,”wo ini harus dikembalikan lagi.Dibatalkan itu perpunya”.enggak boleh begitu,biasa saja gitu lo.(5:57-6:24) (Marah)

NAJWA : OKE.(6:25)

ARSUL : bias saja.ya nanti sejarah yang akan membuktikan.(6:26-6:27)

Royyan : jangan sampai sejarahnya buruk ya.

Bivitri : masalahnya...

Fahri : tapi ada salah satu filsafat ya..falsafatnya gini.lembaga negara itu tidak boleh menjadi alat perjuangan.ya sebab nanti itu mengkonversi anda semua menjadi politisi.itu sebenarnay kritik saya kepada konsepsi teman-teman tentang KPK itu.KPK itu di jadikan alat perjuangan.kalau Anda membuat..(6:28-6:49)

ASFIN : kalua melawan korupsi tidak boleh?memperjuangkan untuk menegakkan keadilan gitu Tidak boleh?(6:50-6:55)

FAHRI : sebentar dulu. enggak bisa bos. saya mau ngomong. ini apa.. enggak bisa. Jadi falsafatnya gini. ada watak daripada Lembaga negara. kelembagaan negara itu punya Watak. dia harus apa Namanya emm.. netral dia harus transparan. dia mengikuti ekosistem dari bekerja negara. terutama di dalam negeri demokrasi. (6:51-

NAJWA : OKE (7:16)

Dia tidak boleh di konversi menjadi Lembaga perjuangan. kalo anda mau membuat Lembaga Perjuangan, kayak saya bikin partai politik. partai politik adalah alat berjuang. nanti saya bisa Menunjukkan kepada masyarakat ini ide saya di dalam berjuang. lalu saya berdebat gitu loh.

(6:51-7:33)

NAJWA : bang fahri, kalua tadi, jadi KPK sebagai alat perjuangan untuk membrantas korupsi itu juga tidak Tepat? (7:34-7:37)

FAHRI : itu tidak boleh. sebab polisi juga enggak boleh. (7:38-7:39)

ASFIN : dan KPK harus netral terhadap orang yang melakukan korupsi. begitu maksudnya? (7:40-7:43)

FAHRI : nah anda lompat itu pikirannya itu. (7:43-7:44)

ASFIN : loh tadi kan yang lompat di situ. (7:44-7:46)

FAHRI : lo enggak bisa dong, anda terus menerus mau menjadikan KPK sebagai alat berjuang, sementara Kepolisian tidak boleh menjadi alat berjuang. kejaksaan tidak boleh alat berjuang. pengadilan Tidak boleh menjadi alat berjuang. (7:46-7:57) (Menyalahkan)

ASFIN : kepolisian seharusnya menjadi alat perjuangan juga menegakkan pemulihan hak-hak rakyat. (7:57-8:01)

FAHRI : LOH, anda percaya bahwa koru... e apa... bahwa polisi itu pengennya korupsi dan dia tidak mau Memberantas korupsi. anda percaya jaksa-jaksa. (8:01-8:06)

BIVITRI & ASFIN : tidak ada yang bilang gitu..(8:05)

ASFIN : yang bilang begitu anda melompat,bener nggak omongan saya.(8:06-8:09)

FAHRI : kenapa polisi tidak boleh menjadi alat perjuangan?(8:09-8:11)

ASFIN : polisi seharusnya menjadi alat perjuangan penegak hak-hak asasi manusia.(8:09-8:14) (Mengharapkan)

FAHRI : kenapa jaksa tidak boleh menjadi alat perjuangan,kenapa hanya KPK yang hanya menjadi alat Perjuangan?(8:15-8:19)

ARSUL : hanya KPK..(8:19)

BIVITRI : polisi dan jaksa juga bisa memeriksa korupsi(8:19-8:20)

FAHRI : lalu kemudian membuat ekosistem sendiri.gajinya paling tinggi.(8:20-8:22)

BIVITRI : ada salah persepsi nih kayaknya.(8:23)

FAHRI : GAJI komisionernya paling tinggi,gaji penyidiknya lebih tinggi daripada gaji polisi.Sekarang kalua anda mau membuat gaji polisi sama dengan gaji di KPK,saya yakin polisi berhakJuga gitu loh.(8:22-8:33)

ASFIN : tapi yang bertugas mengawasi kepolisian dan kejaksaan kan komisi DPR.jadi keberhasilan kepolisian dan kejaksaan tergantung DPR.(8:34-8:36)

FAHRI : kalua gaji jaksa di KPK sama dengan gaji jaksa agung tentu juga mereka lebih baik gitu loh.

BIVITRI : ukurannya bukan gaji dong bang?(8:40)

FAHRI : kan jadi itu yang saya maksud.kenapa tidak menstandarisasi diri dalam sistem negara.kembalilah Kepada NKRI dalam system presidensialisme.dipimin oleh presiden untuk memberantas korupsi Dan membangun orchestra pemberantasan korupsi supaya hilang.bukan tambah banyak.ini Tambah banyak di anggap sukses,kan gagal itu berfikir.gitu loh.(8:36-9:01)

ROYYAN : Saya agak sepatat sebetulnya.kita tidak boleh menjadikan KPK sebagai Lembaga yang menjadi Lembaga perjuangan.karena perjuangan yang di

maksud bang fahri mungkin adalah perjuangan Menuju sebuah kepentingan disini ya.(9:01-9:12)

FAHRI : kan anda mau mengatakan bahwa kepentingan anda mulia,kepentingan saya tidak mulia.itu Menurut saya keadilan berpikir yang saya lawan pada semua orang.kalau anda mulai memPosisikan diri,”saya ini pro pemberantasan korupsi dan bang fahri tidak”.saya challenge anda Kita berfikir gitu loh.(9:15-9:31)

ASFIN : bang fahri ini logikanya aneh.apa-apa yang tidak di ungkapkan,di piker ada.tidak,,tidak ada yangMengungkapkan.ya kan. Anda asik sendiri dengan pikiran anda. (9:31-9:40)

Fahri : loh,sekarang anda mengakui tadi KPK sebagai alat perjuangan.dia bilang boleh dong kalau Memberantas korupsi.emang saya enggak mau memberantas korupsi?terus Cuma anda Yang mau memberantas korupsi?kan kesulitan,kearah saya dong dalam posisi saya.saya kanBilang saya bukan presiden.anggota DPR itu tidk bisa seperti KPK.kalau anggota presiden bolehNangkep orang,saya tangkap presiden dulu dong.itu enggak boleh begitu.(9:37-10:00)

BIVITRI : YA BUKTIKAN SAJA SILAHKAN MEMBERANTAS KORUPSI (9:44-9:46)

NAJWA : oke,(9:48)

ASFIN : daritadi kami mengatakan DPR komisi 3 sangat penting menjaga anti korupsi dalam Lembaga Polisi,kejaksaan dan pemerintahan.siapa yang bilang seperti itu?enggak ada.(9:52-10:03)

FAHRI : Jadi kita punya tempat masing-masing.kalau anda dalam negara jangan jadi LSM.jadi Lembaga Negara.atur koordinasi dengan presiden,koordinasi supervise monitoring,ketemu dengan Kapolri,keemu dengan kejaksaan.ah,ini korupsi segini,bagaimana kita habisi bareng-bareng.Bekerjasama saya kira selesai itu cepat.ini mau jago sendiri yang lain brengsek.kan salah.

(10:03-10:23)

HARIS : Enggak-enggak! kayak begitu.saya begini,saya orng yang kerja juga menggunakan kejaksaan, menggunakan KPK, kepolisian juga. Jadi kalau di tanya atau di bilang bahwa “mau jalan sendiri,mau hebat sendiri”enggak lah bos. ya kan ada, misalnya fungsi koordinasi fungsi-fungsi soal supervise itu enggak jalan. Itu tadi makanya saya tanya pada pak moeldoko.Soa strategi nasional itu untuk pemberantasan korupsi ada yang di presiden.(10:23-10:49)

FAHRI : Tadi anda bilang enggak jalan ya?(10:48-10:49)

HARIS : Enggak jalan.(10:50)

Fahri : Gagal dong itu?(10:51)

Haris : Yang gagal itu bukan Cuma KPK.(10:52)

Fahri : ya iya,ada masalah bos.udahlah kita perbaiki bareng-bareng ini.(10:52-10:56)

Haris : enggak ada masalah.tapi memperbaikinya bukan dengan membuat dewan pengawas punyaKewenangan yang di pilih oleh presiden.ya tambah nyemplung KPK nya.(10:56-11:04)

Fahri : ya ini tadi.. tadi sudah ada kegagalan.dia bilang supervasi (11:04-11:07)

Haris : ya kegagalan yang kita definisikan jangan anda balikkan...(11:06-11:10)

Fahri : maka kita berdiskusi.dan sekarang sudah ada politiknya kan? (11:09-11:13)

Haris : iya. Dan anda menuduh ini jadi alat perjuangan.perjuangan apa?(11:13-11:16)

Fahri : bukaaaan.tadi kan anda mengatakan ini supervise,koordinasi,monitoring gagal.kalau menurut Saya,kalau gagal ya evaluasi dong.”ini kita ada gagal ini,oya enggak apa apa kita gagal terus”.ya Enggak bisa gitu dong.(11:16-11:28)

Haris : yam aka evaluasinya apa?evaluasinya apa?mana bahkan (11:25-11:31)

Fahri : nah tadi kan solusinya di ubah.peraturan undang-undang di KPKnya sudh di ubah dong.(11:30-11:33)

Haris : yang di ubah karena evaluasinya apa?permintaan KPK itu UU tipikor.(11:33-11:38)

Fahri :lalu makanya kita berdebat..(11:35)

ROYYAN : obatnya salah,obatnya salah.revisi KPK itu obatnya salah.(11:36-11:41)

HARIS : permintaan KPK itu undang-undang tipikor.(11:41-11:42)

Najwa : kita kembali setelah pariwisata,tetap di mata najwa.(11:42-11:42)

Transkrip Dialog dalam Acara Mata Najwa “Perlawanan Mahasiswa” Part 7

UJIAN REFORMASI”PART7”

NAJWA : Ujian reformasi itu topik MATA NAJWA,dan kita sudah sampai di penghujung acara.pak Moeldoko,apakah ada rencana presiden Jokowi menemui teman-teman mahasiswa?(0:00-0:14)

PAK MOELDOKO : Yak pada dasarnya presiden begitu terbuka ya dengan masukan-masukan.tradisi pak presiden adalah biasa menerima siapapun di istana.kemarin juga dari KPA yang memperjuangkan agrarian ya,reforma agrarian,di terima oleh presiden dengan baik.enggak ada masalah.tapi ya saya juga punya(sambal berdehem kembali)pertemuan tadi malam dengan para senior-senior ya ada satu hal yang poin yang bagus ya mungkin kita gelar area perjuangan.untuk memperjuangkan teman-teman mahasiswa ini,kita berkelahi di kampus dalam kontesk akademik.untuk melihat RUU mana yang akan kita perbaiki,ayo kita bicara di kampus-kampus.(0:15-1:05)

NAJWA : tapi tidak lewat jalan demonstrasi?(1:06-1:07)

PAK MOELDOKO : ya,saya piker itu mungkin lebih...lebih ke kademik ya... lebih bagus ya.daripada dijalan nanti belum tentu ketemu solusinya.tapi kalau itu digiring ke kampus,ayo kita hadirkan beliau-beliau ini ke kampus,dari pemerintah hadirkan ke kampus,mari kita bicara semuanya kan begitu.itu,itu saya pikir lebih bagus dalam konteks pembelajaran ya.(1:08-1:26)

NAJWA : oke...(1:27)

PAK MOELDOKO : berikutnya tadi mas haris ,aku sangat dekat dengan,dia tanya tadi ya.bagaimana sikap pak Moeldoko terhadap KPK?saya ingin tegaskan ya...pada saat saya jadi pangliam TNI ya.KPK itu hari kalau engga ada Moelodoko itu udah rata itu.tapi karena saya saya waktu panglima TNI ada situasi yang harus saya selamatkan pada KPK,KPK hadir dengan sampai saat ini.jadi,jangan salah.pembelaan saya terhadap KPK itu tidak enggak pernah bisa dilipakan oleh KPK itu ya...(1:27-1:58)

NAJWA : ok... baik silahkan mas haris.dan saya ingin kasih kesempatan sedikit untuk mas gufron nanti.(1:59-2:05)

HARIS : saya dikit.saya dikit saja.topiknya agak berbeda mungkin tapi terkait.saya minta tolong ke pak moeldoko kalau bisa bicara ke kapolda.karena,situasi di lapangan tembak-tembakan itu masih terjadi dan bisa enggak dicari cara yang damainya,satu.yang kedua,teman-teman advokasi pendamping hukum keluarga korban itu masih belum dapat akses untuk kekantor-kantor polisi.kalau boleh mala mini di bantu dikomunikasikan itu akan membantu sekali,itu hak-hak hukum mereka pak.kira-kira itu terima kasih.(2:05-2:33)

PAK MOELDOKO : OK.segera saya komunikasikan.(2:33-2:34)

NAJWA : ok,terimakasih pak Moeldoko. Wow Baik silahkan. (2:34-2:37)

FATUR : ya untuk aparat ya,yang pertama saya perlu pertimbangkan kembali terkait etis yang menyampaikan ke public bahwa saat ini ada banyak korban-korban mahasiswa.tapi,yang di umumkan justru aksi-aksi ini ditunggangi dan sebagainya.alih-alih berbicara tentang bagaimana memulihkan korban,bagaimana meniadakan kerusuhan ini.tapi,justru yang dibaca atau yang di komunikasikan kepublik adalah tentang kerusuhan.bagi saya itu satu hal yang tidak berperasaan.seorang massa aksi yang sedang sakit justru di tuduh adalah maksa aksi yang di tunggangi.itu yang pertama.yang kedua,saya ingin ya tadi violence beget violence,kekerasan hanya akan menghasilkan kekerasan.maka dari itu,ayolah gunakan cara-cara yang lebih humanis dari itu.supaya tidak lebih...(2:38-3:18)

NAJWA : kalau tadi,kataya kembali ke kampus saja,tidak usah demo lagi?(3:18-3:22)

ROYYAN : Yah,saya menunggu sekali.kerena memang tadi kita banyak membahas tentang komunikasi public yang mungkin masih kurang baik.artinya dari pernyataan pak Moeldoko ini,kami dari mahasiswa dan segenap masyarakat Indonesia.tentu sangat menanti sekali kapan kita berbicara langsung dengan perwakilan rakyat kita,baik diDPR maupun dari pak presiden sendiri.(3:22-3:38)

FATUR : atau gini mbak nana,atau gini.daripada capek keliling kampus,kita langsung ngomong saja ke istana aja,gitu.kalau kita aksi di terima saja.(3:38-3:46)

PAK MOELDOKO : oo,, boleh setiap saat enggak ada masalah.(3:46-3:47)

FATUR : oh,,siap yah.kita tagih.(3:48)

PAK MOELDOKO : oh ya...(3:49)

FATUR : kita tagih ya.(3:50)

PAK MOELDOKO : Dengan senang hati.(3:53)

NAJWA : Oke.oke.baik,baik.yang jelas memang ada maklumat tuntaskan informasi.saya ingin berikan waktu yang terakhir di mata najwa episode ini untuk para mahasiswa untuk membacakan tuntu,eh...maklumat tuntaskan reformasi.silahkan berdiri.

Dan bagi teman-teman yang juga merasa tuntutan mahasiswa ini menyuarakan aspirasi teman-teman,silahkan berdiri untuk menunjukkan dukungan.(3:54-4:19)

MAHASISWA : Maklumat tuntaskan reformasi.

NAJWA DAN PENONTON : Maklumat tuntaskan reformasi.

MAHASISWA : Satu, restorasi upaya pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme

NAJWA DAN PENONTON : Satu, restorasi upaya pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme.

MAHASISWA : Dua, restorasi demokrasi kebebasan berpendapat dan kebebasan HAM.

NAJWA DAN PENONTON : Dua, restorasi demokrasi kebebasan berpendapat dan kebebasan HAM.

MAHASISWA : Tiga, reformasi agraria, perlindungan SDA dan tenaga kerja.

NAJWA DAN PENONTON : Tiga, reformasi agrarian, perlindungan SDA dan tenaga kerja.

MAHASISWA : Empat, restorasi kesatuan bangsa, hapuskan diskriminasi dan ketimpangan.

NAJWA DAN PENONTON : Empat, restorasi kesatuan bangsa, hapuskan diskriminasi dan ketimpangan.

MAHASISWA : Hidup mahasiswa !

PENONTON : Hidup mahasiswa !

FATUR : Lawan koruptor !

PENONTON : Lawan koruptor ! (4:32-5:35)

NAJWA : Terima kasih telah hadir dimata najwa. terima kasi pak moeldoko telah hadir. (5:38-5:43)

PAK MOELDOKO : Baik. (5:44)

FAHRI : Oo sudah selesai? (5:45)

NAJWA : Sudah selesai bang fahri, terimakasih bang fahri telah hadir. bang Arsul terimakasih sudah hadir. (5:46-5:50)

ARSUL : Yang untung nasdem ini, salam restorasi. hahahahahahahahahahahah (5:51-5:52)

NAJWA : Terimakasih professor Edi (5:53)

NAJWA : Mengapa undang-undang di susun diam-diam lewat rapat sembunyi – sembunyi hingga larut malam. Publik mencemaskan banyak kebijakan yang di buat tergesa. yang di susun semena-mena serta jauh dari massa. dengarlah suara-suara yang mengeras dimana-mana. simak baik-baik keluh kesah yang tak berdaya. jangan salahkan rakyat memaksa elit keluar kendang. seruan baik-baik sudah sangat sering di ulang-ulang. para politikus jangan sampai kelewat diri. jngan berpikir rakyat tak

mampu membangun resistensi. meremehkan begitu saja tujuh tuntutan mahasiswa. mencerminkan dunia elit yang makin kedap suara. semua usul sudah disampaikan dengan cara terbuka. jangan diabaikan sebelum semuanya berlipat ganda. (6:02-6:52)

